

**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
(PERUBAHAN RENSTRA)  
KECAMATAN SANANWETAN  
KOTA BLITAR  
TAHUN 2021-2026**



 kecsananwetan

 Kecamatan Sananwetan



<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dimana perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Perubahan Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari perangkat daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan perangkat daerah lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh perangkat daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan pada merupakan petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran strategis selama 5 (lima) tahun kedepan serta

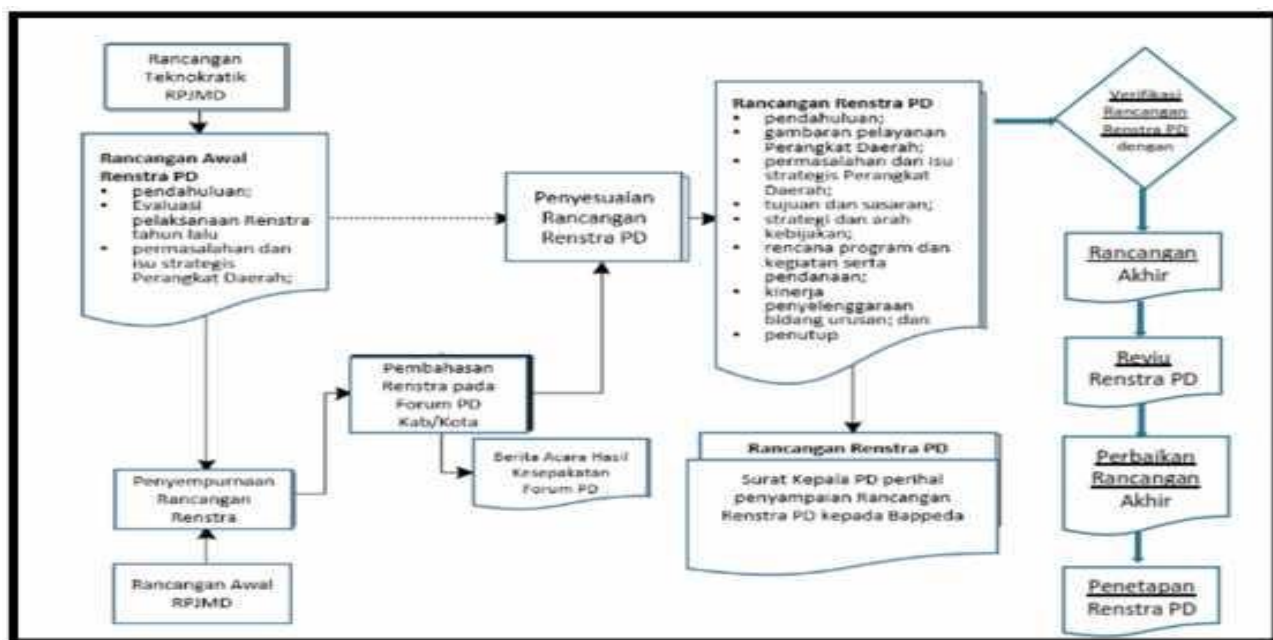
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021- 2026, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sananwetan, maka disusunlah Perubahan Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan isu dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026.

Berdasar hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sesuai Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam memberikan pelayanan kewilayahan untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Perubahan Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sananwetan setiap tahunnya.

Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan ini sebagai berikut:

Gambar 1.1

Tahapan / Proses Perubahan Renstra



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1. **Persiapan penyusunan**, meliputi:
  - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. Orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. **Penyusunan rancangan awal** Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  - e. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja

Perangkat Daerah; dan

- f. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
  - g. Indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. **Penyusunan Rancangan** Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah
  4. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;** Rancangan Perubahan Renstra yang telah disusun dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan stakeholder Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  5. **Perumusan Rancangan Akhir;** hasil rumusan Rancangan Perubahan Renstra yang dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kemudian disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi untuk memastikan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
  6. **Penetapan.** Kecamatan Sananwetan mengemban misi ke lima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi melalui sasaran strategis untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik maka tujuan strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan dan peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik.

Perubahan Perubahan Renstra dilakukan sebagai tindaklanjut terbitnya keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Perubahan Perwali Tupoksi dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ. Terbitnya aturan baru tersebut menyebabkan Perangkat Daerah melakukan perubahan dilevel kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target, dan substansinya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Sananwetan didasarkan pada ketentuan –ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
  29. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ.
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
  32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.( Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021).
  34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

35. Peraturan Walikota Blitar Nomor            Tahun 20            Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan adalah menyediakan arah kebijakan pembangunan di Kecamatan Sananwetan dan penataan ruang selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Kecamatan Sananwetan selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Kecamatan Sananwetan selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
4. Menetapkan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan selama 5 (lima) tahun mendatang;
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima ) tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sananwetan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sananwetan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SANANWETAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sananwetan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sananwetan

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SANANWETAN

Kecamatan Sananwetan merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara, timur dan selatan Kota Blitar dengan luas wilayah 12,15 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 59.364 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 4.566 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Sananwetan terdiri dari 7 Kelurahan. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk sampai dengan Tahun 2020 di masing-masing kelurahan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Sananwetan

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah penduduk		
			L	P	Jumla
1.	Kelurahan Gedog	2,65	5.87	5.83	11.70
2.	Kelurahan	1,95	5.55	5.67	11.23
3.	Kelurahan	2,12	7.17	7341	14.59
4.	Kelurahan	1,79	3.89	3.85	7.743
5.	Kelurahan	1,24	2.55	2.62	5.184
6.	Kelurahan Klampok	1,53	2.56	2.54	5.111
7.	Kelurahan Rembang	0,84	1.58	1.66	3.253

Sumber : BPS Kota Blitar (2021)

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sananwetan

##### a. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

## SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SANANWETAN

(Perwali Nomor 77 Tahun 2016)



Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

- 1) Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda

dan Peraturan Walikota;

- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- 2) Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
- 6) Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- 7) Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- 8) Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- 9) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,

ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

- 11) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- 12) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a) Sub bagian Program dan Kepegawaian;
  - b) Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- 3) Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- 5) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Seksi Pelayanan Umum.

**Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan

administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris menjalankan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing seksi secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi di lingkungan dinas;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi kecamatan;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha kecamatan;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
- n. pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

- fungsi;
- p. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - q. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
  - r. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
  - s. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  - t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - u. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing seksi;
  - v. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - w. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - x. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
    - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
    - b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
    - c) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub Bagian yaitu :

- a. **Sub Bagian Program dan Kepegawaian** melaksanakan tugas :
  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
  2. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi program dan kepegawaian ;
  3. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi program

dan kepegawaian ;

4. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing- masing unit di kecamatan dan kelurahan;
  5. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi pada Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
  6. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) kecamatan dan kelurahan;
  7. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  8. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ;
  9. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  10. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
  12. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan;
  13. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang** melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang ;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
4. Melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan;
5. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
6. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
7. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
8. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
9. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
10. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
11. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
12. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
13. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
14. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
15. Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai ;
16. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;

17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum,** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum ;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan dan ketenteraman ketertiban umum;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
4. Melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
5. Membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
7. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
8. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan ;
9. Menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi Negara ;
10. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan;
11. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah bekas bengkok;
12. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;

13. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah ;
14. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kesra kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
15. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
16. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
17. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
18. Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
19. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
20. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan ;
21. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial di kecamatan;
22. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan,** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

2. Mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan ;
5. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan;
6. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;
7. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil kecamatan dan/atau kelurahan ;
8. Melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
9. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
10. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan;
11. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan di kecamatan;
12. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pembangunan lingkungan hidup di kecamatan;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
14. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
15. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. Melakukan pendataan hasil kerja pemberdayaan masyarakat

dan pembangunan;

17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;
6. Fasilitasi penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan;
7. Fasilitasi penyiapan dan data serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
8. Fasilitasi pembinaan dan monitoring terhadap usaha-usaha ketahanan pangan dan pertanian;
9. Fasilitasi pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di kecamatan;
11. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan

- program penanggulangan kemiskinan;
12. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
  13. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;
  14. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  15. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pelayanan Umum**, mempunyai tugas :

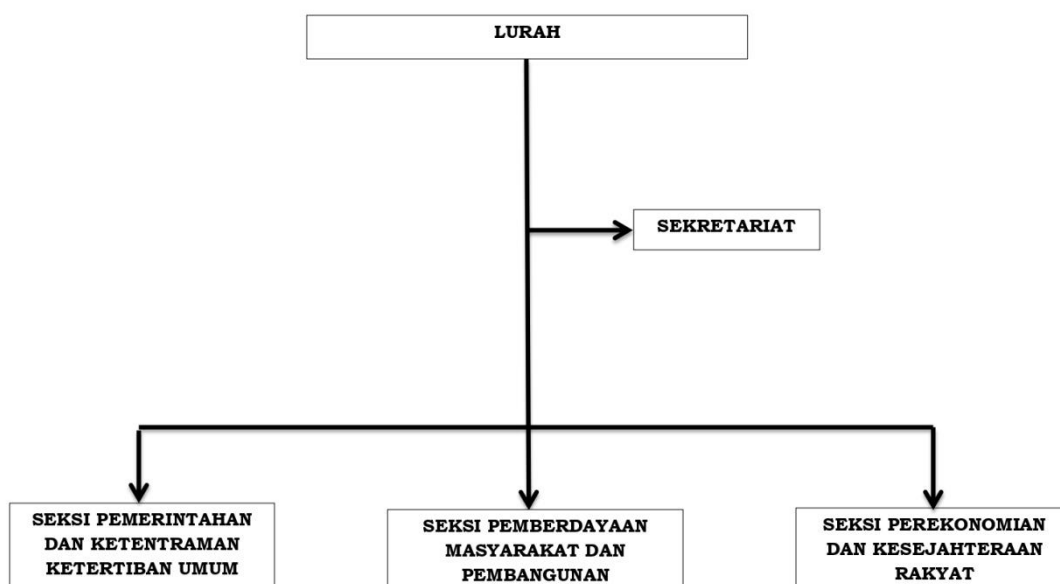
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan publik;
2. Mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan;
5. Menyiapkan dan mengevaluasi data sebagai bahan pembinaan penyusunan monografi kecamatan;
6. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan;
7. Menyusun dan melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
8. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
9. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik di wilayahnya;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
11. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan

menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;

12. Melaksanakan pengelolaan data/ dokumentasi pelayanan publik;
13. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan umum;
14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kelurahan

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**  
(PERWALI NOMOR 77 TAHUN 2006)



Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
5. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website*

Pemerintah Daerah;

15. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

1. Lurah;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

**Sekretaris Kelurahan** mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Lurah;
2. Mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing – masing seksi secara terpadu;
3. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan;
4. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Kelurahan;
5. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA);
6. Menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
7. Mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Kelurahan;
8. Mengelola urusan rumah tangga, tata usaha dan kehumasan serta keprotokolan;
9. Mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Kelurahan;
10. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

11. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. Menyenggarakan, membina dan mengendalikan pelayanan administrasi umum, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
13. Membantu mengelola administrasi kepegawaian di kelurahan;
14. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
16. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
17. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
19. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Kelurahan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
3. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
4. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;

5. Melaksanakan penyusunan monografi kelurahan;
6. Melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Fasilitasi kegiatan Pemilihan Umum ( Pemilu );
9. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan Pemungutan PBB;
10. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
11. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
13. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
14. Melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
15. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga;
16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan perlindungan masyarakat (linmas);
17. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
18. Melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum;
19. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan,** mempunyai tugas:

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam forum musrenbang di kelurahan;
6. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan;
8. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
9. Menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
10. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup;
12. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kelurahan;
14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

- penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,** mempunyai tugas:

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
6. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
7. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
8. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan di kelurahan;
9. Menyiapkan bahan pemberdayaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya di kelurahan ;
10. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat, usaha industri kecil dan menengah;
11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kepemudaan dan olahraga;
12. Melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan

- dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kelurahan;
13. Melakukan pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
  14. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  15. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Sananwetan

### a. **Kecamatan**

Salah satu Sumber Daya Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Sananwetan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas dengan potensi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Sananwetan Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural / Fungsional

<b>No</b>	<b>Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural / Fungsional</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina Tk.I (IV/b)	1

2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk. I (III/d)	10
4	Penata (III/c)	18
5	Penata Md Tk I (III/b)	8
6	Penata Muda (III/a)	7
7	Pengatur Tk I (II/d)	18
8	Pengatur (II/c)	4
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
10	Pengatur Muda (II/a)	0
11	Juru Tk. I (I/d)	1
12	Juru Muda (I/b)	1
Jumlah		73
1	Pasca Sarjana ( S2 )	2
2	Sarjana ( S 1 )	32
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	4
5	Diploma II	1
6	Diploma I	0
7	SMA	30
8	SMP	1
9	SD	2
Jumlah		73
1	Pejabat Struktural	42
2	Pejabat Fungsional P2UPD	0
3	Pejabat Fungsional Auditor	0
Jumlah		42
1	Laki-laki	42
2	Perempuan	31
Jumlah		73

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sananwetan, Desember 2020

b. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Sananwetan memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan

No	JENIS BARANG	KECAMATAN	GEDONG	BENDOGERT	SANANWETAN	KARANGTENGAH	PLOSOKERP	KLAMPOK	REMBANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	2.728 m2	130.101 m2		2.696 m2		2	2	12 bidang
2	Bangunan								
	Kantor	1 unit			1 unit		1 unit	1 unit	1 unit
	Balai/aula	1 unit			1 unit		1 unit	1 unit	
	Rumah Dinas	1 unit			1 unit				

3	Kendaraan Dinas (Mobil)	3 unit							
4	Kendaraan Roda tiga		1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	Sepeda Motor	7 unit (1rusak)	1 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	6 unit	
6	Personal Computer (PC)	16 unit (2 rusak)	5 unit (1 rusak)	3 unit	3 unit	1 unit	2 unit	5 unit	9 unit (3 rusak)
7	Laptop	8 buah	7 buah	6 buah	5 buah	7 buah	8 buah(2 rusak)	5 buah (1 rusak)	3 buah
8	Mesin ketik manual	1 unit (rusak)	1 unit (rusak)			2 unit (rusak)		1 unit (rusak)	1 unit (rusak)
9	Televisi	3 buah (1 rusak)	3 buah (1 rusak)	1 buah	1 buah(rusak)	1 buah	2 buah(1 rusak)	1 buah	3 buah
10	Printer	18 buah	13 buah(5 rusak)	9 buah	13 buah (6 rusak)	8 buah	9 buah(3 rusak)	11 buah (3 rusak)	11 buah (5 rusak)
11	Scanner	2 buah			1 buah	3 buah		2 buah	
12	Brankas	1 buah	1 buah	1 buah	2 buah(1 rusak)	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
13	Filling cabinet	10 buah	5 buah	8 buah	8 buah	8 buah	4 buah	6 buah	8 buah
14	Almari kaca	5 buah	2 buah	1 buah	2 buah	1 unit	2 buah	3 unit	
15	Almari biasa(kayu)	3 buah	2 buah	1 buah	2 buah	1 unit	4 buah	2 unit	4 buah(rusak)
16	Almari katalog	1 buah							
17	Almari arsip (kayu)	2 buah		1 buah	1 buah	4 buah		2 buah	12 buah (6 rusak)
18	Meja kerja pimpinan	9 buah		1 buah	5 buah	1 unit	5 buah	1 unit	
19	Meja kerja staf	24 buah (4 rusak)	8 buah	10 buah	6 buah	7 unit	4 buah	4 unit	4 unit
20	Meja Pimpinan rapat	1 buah		1 buah	3 buah	1 unit		5 unit	
21	Meja Kursi Tamu	4 set	2 set	1 set	2 set	1 set	3 set	2 set (1 rusak)	3 set (1 rusak)
22	Kursi kerja Pimpinan	9 buah	5 buah	1 buah	5 buah	1 buah	4 buah	1 buah	1 buah
23	Kursi staf	14 buah		10 buah	6 buah	5 buah	4 buah	9 buah	
24	Kursi rapat (plastik)	200 buah (40 rusak)		200 buah	200 buah	150 buah	200 buah (40 rusak)	150 buah (10 rusak)	175 buah (75 rusak)
25	Kursi hadap	4 buah			4 buah	2 buah	4 buah	5 buah	
26	Kursi tunggu pelayanan	5 set	2 set	3 set	1 set	2 set	2 set	2 set	6 set (rusak)

27	Papan white board	2 buah			10 buah (4 rusak)	1 buah	2 buah	4 buah	
28	Kipas angin	8 buah	10 buah	5 buah	6 buah (3 rusak)	3 buah (1 rusak)	6 buah	6 buah	
29	Pesawat telepon	8 unit	2 unit (1 rusak)	1 unit	6 unit	1 unit	2 unit	1 unit	
30	Tape recorder	2 unit	2 unit (1 rusak)		1 unit	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit (rusak)
31	Handy Talky ( HT )	3 unit	2 unit	2 unit(1 rusak)	3 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
32	Kamera	1 buah							
33	Kamera digital	5 buah (1 rusak)	2 buah	1 buah	1 buah (rusak ringan)	2 buah	3 buah(2 rusak)	3 buah	1 buah(rusak)
34	Sound system	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	3 unit (2 rusak)
35	Alat musik ( Band)/tradisional	1 unit			1 unit				
36	Vacuum Cleaner	1 buah	1 buah(1 rusak)						
37	Mesin Pemotong rumput	1 unit						1 unit	
38	Tenda ( terop)	5 unit			2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
39	Podium	2 buah	1 buah	1 buah(rusak)	1 buah	1 buah		1 buah	
40	Joglo tempat tulisan	2 buah (1 rusak)	1 buah	1 buah				1 buah	1 buah
41	LCD Proyektor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	1 unit
42	Layar Screen	1 unit		1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
43	Handycam	1 unit							
44	AC Split dinding	6 unit	3 unit	2 unit	5 unit	3 unit		2 unit	
45	Dispenser	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
46	Mesin Faximile	1 unit							
47	Arco	2 buah							
48	Papan data	1 buah	1 buah						10 buah
49	Tablet	9 buah	6 buah						1 buah
50	Gerobak	2 buah							
51	Mesin Finger print	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
52	Meja pelayanan	1 paket	1 paket						1 paket
53	UPS	4 buah	4 buah						
54	CCTV	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket			
55	Alat Pemadam Api	2 buah	1 buah						
56	Alat penghancur kertas	1 buah							

57	Rak koran		1 buah					
58	Sepeda Elektrik		1 buah (1 rusak)					1 buah (1 rusak)
59	Taplak meja rempel		5 buah (3 rusak)					
60	Kompore gas		1 buah					
61	Megaphone		1 buah					
62	Papan neon box		2 buah					1 buah
63	Rak piring almari kaca		1 buah					
64	Karpet		2 buah					
65	Korden		1 unit					10 unit
66	Pompa air		1 buah					
67	Kursi lipat chitos		20 buah (rusak)					
68	Biopori	1 buah	2 buah					
69	Jaringan LAN wifi outdoor		1 paket					1 paket
70	Prolink USB		1 buah					
71	Papan tulis		1 buah					
72	Tandon air		1 buah					
73	Tenda Viar		1 paket					
74	Radio Aksesoris		2 buah					
75	Pintu kaca		2 buah					
76	PABX		1 buah					
77	Genset	1 unit		1 unit				
78	Kulkas	1 unit					1 unit	
79	Roll meter uk.100 m							1 buah (rusak)
80	Papan Visual							1 buah (rusak)
81	Rak kayu							3 buah (rusak)

### 2.3 Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sananwetan

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, maka sebagai Perangkat Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan urusan pelayanan masyarakat sehingga Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Selain itu Kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan kemampuan akses kepada masyarakat yang demikian dekat maka kecamatan memiliki peran yang strategis bagi pemerintah.

Program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Sananwetan bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program- program Pemerintah. Program-program yang ditetapkan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sananwetan dan pengelolaan pendanaan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Kecamatan Sananwetan Tahun 2017 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2021)	Target IKK (2021)	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra</b>																		
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan				baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
2	Persentase Pelayanan yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan				72%	90%	92%	94%	97%	88%	91%	93%	10%	10%	122%	101%	101%	106%	103%
3	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>II</b>	<b>Indikator Program Prioritas</b>																		
1	Presentase pelayanan tepat waktu				-	100%	100%	95%	-	-	100%	100%	95%	-	-	98,80%	96,61%	92%	100%
2	Presentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan, dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti				-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	99%	100%	100%	-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan adalah merupakan indikator tujuan, yaitu “meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dengan indikatornya tercapainya **nilai baik** pada **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan**. Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan Pengukuran Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Sananwetan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, yang menitik beratkan pada 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat yang meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana. Dalam pengukuran nilai SKM bertarget baik, tercapai nilai tercapai mulai tahun 2017 – 2020, maka proyeksi nilai baik dapat dicapai di tahun 2021.

Pada sasaran I, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ”. Indikator kinerja strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya yakni dengan melaksanakan penghitungan persentase kepuasan masyarakat yang selama ini tercatat pada anjungan layanan yang ada di ruang pelayanan. Setiap selesai menerima layanan, maka diwajibkan mengisi survey kepuasan sehingga dapat diketahui jumlah pengguna layanan yang puas dan tidak puas terhadap layanan yang diberikan perangkat kecamatan. Dari data tabel diatas diperoleh nilai rasio capaian lebih dari 100%, artinya seluruh realisasi pencapaian kinerja melebihi target.

Komitmen Kecamatan Sananwetan dalam mencapai target kinerja “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ” melalui pengukuran 9 (sembilan) indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan pengukuran kualitas layanan.

Indikator kedua yaitu persentase jumlah koordinasi dan

pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti adalah hasil dari penghitungan jumlah hasil koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah dalam satu tahun yang selanjutnya dikalikan 100%.

Capaian sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang dinilai dari persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan wilayah maka selama tahun 2017 sampai dengan 2020 capaiannya 100%, yang artinya seluruh koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terselesaikan seluruhnya. Kunci keberhasilan tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis yang kedua ini, yaitu :

1. Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi semua. Seperti halnya SOP, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2020, Kecamatan Sananwetan memanfaatkan media sosial seperti *Website*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sananwetan.
2. Hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi kecamatan (TNI dan POLRI) dapat terjalin dengan baik. Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan kecamatan,

FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan.

Tabel 2.3.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak langsung	6.049.146.051,00	5.932.188.440,00	6.489.787.023,33	8.424.840.070,00	7.574.355.485,00	5.833.547.862,00	5.258.130.661,00	5.987.564.004,00	7.216.058.910,00	6.689.933.850,00	96,44%	88,64%	92,26%	85,65%	88,32%	449.757.621,75	437.874.322,00
Belanja Langsung	9.069.806.477,00	6.562.491.715,00	9.036.388.480,00	14.067.206.771,50	13.288.498.042,00	9.013.210.366,00	6.359.252.300,50	8.913.352.214,68	13.763.760.026,50	13.006.997.278,14	99,38%	96,90%	98,63%	97,84%	97,88%	2.693.842.912,21	2.500.585.846,94
Jumlah Belanja	15.118.952.528,00	12.494.680.155,00	14.526.175.503,30	22.492.046.841,50	20.862.853.527,00	14.846.758.228,00	11.617.382.961,50	20.888.480.222,68	20.979.818.936,50	19.696.932.128,14	97,91%	92,77%	95,45%	91,75%	93,10%	1.571.800.266,98	1.469.230.084,47

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta sesuai dengan misi Kota Blitar yang keenam yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni:

**Tantangan :**

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat;
2. Belum optimalnya hasil pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha mandiri;
3. Masyarakat semakin kritis dalam mengawal pembangunan daerah dan perencanaan berkualitas.
4. Program pemerintah RT berdaya, perlu tindak lanjut secara operasional

**Peluang :**

1. Tersedianya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Teknologi Informasi Pemerintah Kota;
2. Tersedianya dukungan dana dari APBD maupun APBN untuk pelatihan keterampilan dan kredit lunak peningkatan usaha mandiri;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada secara maksimal untuk peningkatan koordinasi dan komunikasi;
4. Sinergitas yang baik dengan pemangku kepentingan baik intern pemerintah Kota Blitar, instansi vertikal, masyarakat maupun pihak swasta.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN**  
**SANANWETAN**

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sananwetan**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan Sananwetan berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, tugas Kecamatan Sananwetan membantu Wali Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan, permasalahan Kecamatan Sananwetan yang berhasil diobservasi dan dihipunk adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum optimalnya dukungan untuk menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai garda depan pelayanan	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur kelurahan dan kecamatan.	Belum optimalnya peningkatan kapasitas personil Kelurahan dan Kecamatan
2	Belum optimal koordinasi di bidang pemerintahan / pembangunan di wilayah	Belum optimalnya sinkronisasi tupoksi dan kewenangan antara kelurahan, kecamatan dengan Perangkat Daerah	Regulasi dan strategi terkait pemisahan kewenangan antara kelurahan, kecamatan dengan Perangkat Daerah belum jelas

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan dalam lima tahun mendatang. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Kecamatan Sananwetan mengharapkan kebijakan dan dukungan sebagai berikut;

1. Penyediaan sarana dan Prasarana pendukung pelayanan untuk mewujudkan pelayanan mudah, berbasis IT dan paperless.
2. Mewujudkan sinergitas yang baik dengan pengampu pelayanan

publik baik pemangku kepentingan terkait yaitu Perangkat Daerah maupun instansi vertikal.

3. Regulasi yang tegas dan jelas atas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah.
4. Dukungan penuh kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam peningkatan motivasi dan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia di wilayah.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan mengemban visi kepala daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan perangkat Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah

**”KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”.**

Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup”.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- o Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- o Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-

Rohani, Cerdas dan Berkarakter

- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi,

Diantara kelima misi diatas Kecamatan Sukorejo mengemban pada misi kelima yaitu: “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi,**” Misi tersebut disikapi Kecamatan Sukorejo dengan Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan dan Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan
2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
3. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilyahan

Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan kontekstual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin responsif dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan. Dari Sapta prioritas program tersebut, Kecamatan terkait langsung dalam implementasi Program Blitar Keren.

Sapta Program Prioritas	Konsep Operasional	Program Nomenklatur Perencanaan
Program Blitar Keren	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Program ini memuat program unggulan inovatif berupa: RT Keren dan Internet RT/RW</li> <li>□ Konsep program adalah pembangunan partisipatif berbasis kewilayahan yang bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.</li> <li>□ Setiap RT mendapat alokasi dana Rp 50 – 100 juta yang difokuskan untuk pembangunan fisik dan non fisik.</li> <li>□ Warga di tingkat RT merumuskan kegiatan secara partisipatif, kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> </ul>

Selain itu selaku pemangku wilayah, Kecamatan juga ikut terlibat dalam pelaksanaan Sapta program Prioritas lainnya yaitu Blitar Melayani, Blitar Sehat, Blitar Cerdas, Blitar Makmur dan Blitar Membangun dan kondusif.

### 3.3 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perubahan Renstra SKPD Provinsi Terkait

Sasaran jangka menengah dari Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 menyebutkan tujuan pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur” dengan sasaran yang menjadi ukuran keberhasilan antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Sasaran Jangka menengah Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tersebut sinergis dengan sasaran dari Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ” dan sasaran kedua yaitu, “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”. Untuk melaksanakan tujuan Perubahan Renstra di Kecamatan Sananwetan, terdapat beberapa kendala, yaitu Belum optimalnya dukungan untuk menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai garda depan pelayanan dan belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan/pembangunan di

wilayah. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Kecamatan Sananwetan berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra PD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra Provinsi Jawa	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sananwetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya dukungan untuk menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai garda depan pelayanan	1. Belum adanya Regulasi yang tegas dan jelas atas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah	1. sinergitas yang baik dengan pengampu pelayanan publik baik pemangku kepentingan terkait yaitu Perangkat Daerah maupun instansi vertikal
			2. Kemampuan Sumberdaya Manusia dalam pelayanan berbasis IT masih rendah	2. Peran aktif masyarakat dalam penguatan lembagakemasyarakatan kelurahan

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar tahun 2011 – 2030 dan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Blitar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar tahun 2017-2037, Kecamatan Sananwetan masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) 4. Sebagaimana telaahan Perubahan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar Tahun 2021-2026, pada pelaksanaannya peran Kecamatan dan Kelurahan dalam pengendalian tata ruang sangat diperlukan.

Dalam Dokumen KLHS menyebutkan isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan

menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Keterkaitan Program yang ada pada Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan ditunjukkan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sejalan dengan analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada pilar Ekonomi dan Sosial utamanya tema besar pengembangan ekonomi lokal, Kemiskinan dan peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sejalan dengan analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada pilar Lingkungan dan Tata Kelola. Dengan demikian dalam pelaksanaannya Kecamatan Sananwetan akan mengacu pada telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011. Apabila dikomparasikan sasaran dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan dan dokumen KLHS RPJMD Kota Blitar dapat ditarik sinergi walaupun tidak persis sama, namun substansi pemberdayaan masyarakat menjadi capaian kinerja menjadi muara tujuannya.

### 3.5 Penentuan Isu – isu strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT;
2. Belum optimalnya koordinasi pembangunan Infrastruktur kewilayahannya;
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan;
4. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Dari permasalahan diatas, Kecamatan Sananwetan menentukan isu strategis yaitu, “Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan Sananwetan”.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sananwetan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.1.1

## Tujuan , Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sananwetan Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TUJUAN TAHUN 2022- 2026	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik (90)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	97%	97%	97%	98%	98%
					Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang melaksanakan program kelurahan berdaya : Jumlah kelurahan )x 100%	75%	75%	75%	75%	75%
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	A(89.88)	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan pada tahun berkenaan	A(85.00)	A(86.88)	A(87.89)	A(88.89)	A(89.88)

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Penentuan Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1.1

#### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<i>Visi: Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat</i>			
<i>Misi V: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik Bersih Berbasis Teknologi Informasi</i>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Peningkatan system penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan

	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilyahan	-Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan -Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja - Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sananwetan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sananwetan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sananwetan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program – program Kecamatan Sananwetan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sananwetan**  
**Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi / Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		Keterangan
						Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	19
<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</b>		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	A	A		
			Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	A	A		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		81	Baik (82)	10.907.100.008	Kecamatan Sananwetan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	100%	100%	48.668.300	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen	4.470.800	Kecamatan

	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		3 dokumen	3 dokumen	1.201.100	Kelurahan Gedog
	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		3 dokumen	3 dokumen	1.472.000	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen	2.584.600	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		3 dokumen	3 dokumen	1.323.000	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		4 dokumen	4 dokumen	2.100.000	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		3 dokumen	3 dokumen	2.211.300	Kelurahan Rembang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun		3 dokumen	3 dokumen	18.495.600	Kecamatan
	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	400.000	Kelurahan Gedog
	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	1.472.000	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	1.546.000	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	3.653.700	Kelurahan Klampok
	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	2.490.900	Kelurahan Rembang

	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	1.472.000	Kelurahan Bendogerit
		Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen	1.353.300	Kelurahan Karangtengah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	1.372.000	Kelurahan Klampok
		Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	1.050.000	Kelurahan Plosokerep
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu / Jumlah laporan keuangan yang tersusun) x 100%	100%	100%	8.374.743.327	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya		75 orang	75 orang	8.374.743.327	Kecamatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart : Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) x 100%	100%		494.724.700	

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	5 even	350.000.000	Kecamatan
	Jumlah Peserta Sosialisasi DBHCHT		700 orang	700 orang		
	Jumlah Publikasi Program/kegiatan perangkat daerah		1 publikasi	1 publikasi		
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	5 even	20.973.900	Kelurahan Gedog
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	5 even	23.327.200	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	5 even	18.948.100	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 even	4 even	23.140.900	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		3 even	3 even	19.325.400	Kelurahan Klampok
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	5 even	19.954.600	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	5 even	19.054.600	Kelurahan Rembang

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart / Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah) x 100%	100%	100%	819.317.500	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		10 komponen	10 komponen	10.922.600	Kecamatan
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		7 komponen	7 komponen	2.487.000	Kelurahan Gedog
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 komponen	9 komponen	3.983.300	Kelurahan Bendogerit
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		8 komponen	8 komponen	4.523.200	Kelurahan Sananwetan
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		6 komponen	6 komponen	6.123.800	Kelurahan Karangtengah
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 komponen	9 komponen	5.209.700	Kelurahan Klampok
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		8 komponen	8 komponen	1.910.800	Kelurahan Plosokerep

	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 komponen	7 komponen	3.517.700	Kelurahan Rembang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi	2 macam	2 macam	61.457.000	Kecamatan
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kntor yang terpenuhi	1 macam	1 macam		
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi	1 macam	1 macam	50.089.600	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	2 macam	2 macam		
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kntor yang terpenuhi	8 macam	8 macam	78.893.800	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi	1 macam	1 macam	-	Kelurahan Klampok
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kntor yang terpenuhi	1 macam	1 macam	7.795.200	Kelurahan Plosokerep
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	5 macam	5 macam	36.756.400	Kecamatan
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	29 macam	29 macam	9.830.200	Kelurahan Gedog
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	15 macam	15 macam	8.643.400	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	20 macam	20 macam	10.133.100	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	19 macam	19 macam	12.799.600	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	19 macam	19 macam	4.255.100	Kelurahan Klampok

	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		15 macam	15 macam	3.135.500	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		14 macam	14 macam	3.548.700	Kelurahan Rembang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		1910 dos	1910 dos	83.997.100	Kecamatan
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		23 macam	23 macam		
	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		902 dos	902 dos	23.585.900	Kelurahan Gedog
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		21 macam	21 macam		
	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		352 dos	352 dos	19.107.700	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		24 macam	24 macam		
	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		530 dos	530 dos	41.963.900	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		28 macam	28 macam		
	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		400 dos	400 dos	38.423.100	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		30 macam	30 macam		
	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		704 dos	704 dos	22.901.300	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		24 macam	24 macam		
	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia		330 dos	330 dos	16.409.500	Kelurahan Rembang
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		14 macam	14 macam		

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia		6 cetakan	6 cetakan	20.048.100	Kecamatan
	Jumlah lembar penggandaan		17457 lembar	17457 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		4 cetakan	4 cetakan	2.804.100	Kelurahan Gedog
	Jumlah lembar penggandaan		2477 lembar	2477 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		4 cetakan	4 cetakan	7.864.400	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah lembar penggandaan		1000 lembar	1000 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		4 cetakan	4 cetakan	11.709.600	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah lembar penggandaan		4500 lembar	4500 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		5 cetakan	5 cetakan	13.619.400	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah lembar penggandaan		24880 lembar	24880 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		4 cetakan	4 cetakan	5.400.200	Kelurahan Klampok
	Jumlah lembar penggandaan		4726 lembar	4726 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		4 cetakan	4 cetakan	6.246.400	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah lembar penggandaan		11767 lembar	11767 lembar		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia		4 cetakan	4 cetakan	7.447.400	Kelurahan Rembang
	Jumlah lembar penggandaan		7945 lembar	7945 lembar		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	11.220.000	Kecamatan
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	7.620.000	Kelurahan Gedog
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	5.940.000	Kelurahan Bendogerit

		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		4 bahan bacaan	4 bahan bacaan	9.180.000	Kelurahan Sananwetan
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	4.980.000	Kelurahan Karangtengah
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	7.440.000	Kelurahan Klampok
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	5.940.000	Kelurahan Plosokerep
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	7.800.000	Kelurahan Rembang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		14 rakor	14 rakor	88.374.400	Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		100%	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia		2 macam	2 macam	7.779.300	Kelurahan Gedog
		Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia		1 macam	1 macam	8.000.000	Kelurahan Plosokerep
		Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia		2 macam	2 macam	7.500.000	Kelurahan Rembang
	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia		1 macam	1 macam	-	Kelurahan Plosokerep
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart : jumlah penyediaan jasa penunjang usrusan) x 100%	100%	100%	580.585.861	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	3 rekening	71.894.025	Kecamatan

	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	3 rekening	21.805.300	Kelurahan Gedog
	Jumlah rekening yang terbayarkan		2 rekening	2 rekening	18.970.000	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah rekening yang terbayarkan		4 rekening	4 rekening	37.001.600	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	3 rekening	30.594.700	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah rekening yang terbayarkan		2 rekening	2 rekening	-	Kelurahan Klampok
	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	3 rekening	18.804.400	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rekening	3 rekening	24.417.816	Kelurahan Rembang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		12 iuran	12 iuran	320.442.800	Kecamatan
	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia		8 orang	26 orang		
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		2 iuran	2 iuran	960.000	Kelurahan Gedog
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		1 iuran	1 iuran	900.000	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		1 iuran	1 iuran	900.000	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		1 iuran	1 iuran	1.502.400	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		1 iuran	1 iuran	29.992.820	Kelurahan Klampok
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		1 iuran	1 iuran	1.200.000	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		1 iuran	1 iuran	1.200.000	Kelurahan Rembang

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah barang milik daerah yang terpelihara sesuai standart / Jumlah barang milik daerah) x 100%	100%	100%	545.728.420	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		9 unit	9 unit	92.355.600	Kecamatan
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		9 unit	9 unit		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit	6 unit	6.367.300	Kelurahan Gedog
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		6 unit	6 unit		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit	6 unit	15.420.600	Kelurahan Bendogerit
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		6 unit	6 unit		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit	6 unit	9.260.200	Kelurahan Sananwetan
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		6 unit	6 unit		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		7 unit	7 unit	14.071.600	Kelurahan Karangtengah
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		7 unit	7 unit		

	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit	6 unit	10.401.100	Kelurahan Klampok
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		6 unit	6 unit		
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit	6 unit	9.359.650	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		6 unit	6 unit		
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit	6 unit	12.236.500	Kelurahan Rembang
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		6 unit	6 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		6 jenis	6 jenis	19.542.800	Kecamatan
	Jumlah meubelair yang terpelihara					
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		3 jenis	3 jenis	8.028.600	Kelurahan Gedog
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		3 jenis	3 jenis	11.335.800	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		5 jenis	5 jenis	9.220.800	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		5 jenis	5 jenis	12.529.200	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		4 jenis	4 jenis	7.513.500	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		15 jenis	15 jenis	13.394.000	Kelurahan Rembang

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		1 unit	1 unit	4.087.000	Kecamatan
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		1 unit	1 unit		Kelurahan Gedog
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		1 unit	1 unit	59.000.000	Kelurahan Bendogerit
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		2 unit	2 unit	32.450.000	Kelurahan Sananwetan
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		2 unit	2 unit	134.935.970	Kelurahan Plosokerep
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		6 jenis	6 jenis	14.190.600	Kecamatan
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		3 jenis	3 jenis		Kelurahan Gedog
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		5 jenis	5 jenis	8.307.000	Kelurahan Bendogerit
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		3 jenis	3 jenis	8.766.800	Kelurahan Karangtengah
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		4 jenis	4 jenis	24.187.800	Kelurahan Klampok
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		4 jenis	4 jenis	8.766.000	Kelurahan Plosokerep
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik(81,37)	Baik (84)		

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat		Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	97%	97%		
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	(Jumlah pelayanan yang tepat waktu : Jumlah semua pelayanan) x 100%	97%	97%	2.553.562.230	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart		NA	100%	1.680.935.500	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		420 orang	420 orang	650.104.500	Kecamatan
			Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga		
			Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		14 kelompok	14 kelompok		
			Jumlah peserta lomba keolahragaan		14 tim	14 tim		
			Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		2 tradisi lokal	2 tradisi lokal		
			Persentase penerima santunan kematian		100%	100%		
			Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		75 orang	75 orang	82.425.500	Kelurahan gedog

Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga	171.099.500	Kelurahan Bendogerit
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok		
Jumlah peserta lomba keolahragaan		30 tim	30 tim		
Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		1 tradisi lokal	1 tradisi lokal		
Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		152 orang	152 orang		
Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		7 lembaga	7 lembaga	234.653.500	Kelurahan Sananwetan
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok		
Jumlah peserta lomba keolahragaan		22 tim	22 tim		
Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		1 tradisi lokal	1 tradisi lokal		
Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		170 orang	170 orang		
Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		7 lembaga	7 lembaga	104.552.800	Kelurahan Karangtengah
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok		
Jumlah peserta lomba keolahragaan		34 tim	34 tim		
Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		2 tradisi lokal	2 tradisi lokal		
Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		59 orang	59 orang		
Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		7 lembaga	7 lembaga		

Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok	134.680.200	Kelurahan Kalmpok
Jumlah peserta lomba keolahragaan					
Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		1 tradisi lokal	1 tradisi lokal		
Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		109 orang	109 orang		
Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga		
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok		
Jumlah peserta lomba keolahragaan				125.172.300	Kelurahan Plosokerep
Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		1 tradisi lokal	1 tradisi lokal		
Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		62 orang	62 orang		
Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		7 lembaga	7 lembaga		
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok		
Jumlah peserta lomba keolahragaan		16 tim	16 tim		
Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		1 tradisi lokal	1 tradisi lokal	178.247.200	Kelurahan Rembang
Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat		204 orang	204 orang		
Jumlah lembaga / organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		5 lembaga	5 lembaga		
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran		1 kelompok	1 kelompok		
Jumlah peserta lomba keolahragaan		3 lomba	3 lomba		

			Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan		1 tradisi lokal	1 tradisi lokal			
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>(Jumlah koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan) x 100% (kriteria standart : sesuai dengan SPP Kecamatan)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>872.626.730</b>		
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen	386.675.330	Kecamatan Sananwetan	
			Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen			
			Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan			
			Jumlah P3N/modin nikah yang terfasilitasi		10 orang	10 orang			
			Jumlah peserta pembinaan pelayanan		160 orang	160 orang			
			Jumlah peserta lomba pelayanan						
			Jumlah Peserta pemahaman Zona Integritas dan pelayanan online						
			Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen	99.905.800	Kelurahan Gedog	
			Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen			
			Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan			

Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		80 pasang	80 pasang	84.477.500	
Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen		Kelurahan Bendogerit
Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan		
Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		70 pasang	70 pasang	120.719.900	
Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen		Kelurahan Sananwetan
Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan		
Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		85 pasang	85 pasang	53.038.600	
Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen		Kelurahan Karangtengah
Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan		
Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		45 orang	45 orang	50.582.500	
Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen		Kelurahan Kalmpok
Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan		
Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		40 pasang	40 pasang	40.064.300	
Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen		Kelurahan Plosokerep
Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		

			Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan		
			Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		30 orang	30 orang		
			Jumlah dokumen monografi yang tersusun		2 dokumen	2 dokumen	37.162.800	Kelurahan Rembang
			Jumlah dokumen SKM yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
			Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi		13 pelayanan	13 pelayanan		
			Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi		25 orang	25 orang		
			Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan berdaya / jumlah kelurahan) x 100%	75%	75%		
	<b>Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah</b>							
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	(Jumlah hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang sesuai standart : Jumlah semua hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan) x 100%	NA	100%	17.329.074.300	

			2. Persentase rt berdaya	(Jumlah RT yang melaksanakan program RT berdaya : Jumlah RT) x 100 %	NA	75%		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	(Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan ) x 100%	NA	100%	16.978.206.300	
			2. Persentase pemberdayaan RT yang dilaksanakan sesuai standart		NA	75%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD		275 orang	275 orang	525.568.100	Kecamatan Sananwetan
			Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan		7 kelurahan	7 kelurahan		
			Jumlah lokasi kerja bakti		7 lokasi	7 lokasi		
			Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		3 lembaga	3 lembaga		
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		70 orang	70 orang		

Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		2 lomba	2 lomba	3.165.939.900	
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum					
Jumlah peserta musrenbang RKPD		1675 orang	1675 orang		Kelurahan Gedog
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum					
Jumlah RT yang melakukan rembuk warga		50 RT	50 RT		
Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		50 RT	50 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		15 lokasi	15 lokasi		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		7 lembaga	7 lembaga		
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi					
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen	2.850.912.400	
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan					
Jumlah peserta musrenbang RKPD		1555 orang	1555 orang		Kelurahan Bendogerit
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum					
Jumlah RT yang melakukan rembuk warga		45 RT	45 RT		
Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		45 RT	45 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		11 lokasi	11 lokasi		

Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga	3.901.773.900	
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan					
Jumlah peserta musrenbang RKPD		980 orang	980 orang		Kelurahan Sananawetan
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum		6 lokasi	6 lokasi		
Jumlah RT yang melakukan rembug warga		60 RT	60 RT		
Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		60 RT	60 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		8 lokasi	8 lokasi		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga		
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		60 orang	60 orang		
Jumlah peserta musrenbang RKPD		1230 orang	1230 orang	2.318.421.600	Kelurahan Karangtengah
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum		36 lokasi	36 lokasi		
Jumlah RT yang melakukan rembug warga		36 RT	36 RT		

Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		36 RT	36 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		5 lokasi	5 lokasi		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		2 lembaga	2 lembaga		
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		60 orang	60 orang		
Jumlah peserta musrenbang RKPD		70 orang	70 orang	1.679.220.100	Kelurahan Klampok
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum		1 lokasi	1 lokasi		
Jumlah RT yang melakukan rebug warga		24 RT	24 RT		
Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		24 RT	24 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		8 lokasi	8 lokasi		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		3 lembaga	3 lembaga		
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		50 orang	50 orang		
Jumlah peserta musrenbang RKPD		1000 orang	1000 orang	1.455.767.900	Kelurahan Plosokerep
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum		1 lokasi	1 lokasi		

Jumlah RT yang melakukan rebug warga		22 RT	22 RT		
Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		22 RT	22 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		8 lokasi	8 lokasi		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga		
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		2 lomba	2 lomba		
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen		
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		35 orang	35 orang		
Jumlah peserta musrenbang RKPD		735 orang	735 orang	1.080.602.400	Kelurahan Rembang
Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum		1 lokasi	1 lokasi		
Jumlah RT yang melakukan rebug warga		14 RT	14 RT		
Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%		14 RT	14 RT		
Jumlah lokasi kerja bakti		4 lokasi	4 lokasi		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		4 lembaga	4 lembaga		
Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi		2 lomba	2 lomba		
Jumlah dokumen profil yang tersusun		1dokumen	1dokumen		
Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		80 orang	80 orang		

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Orang yang difasilitasi Posko PPKM	(Jumlah orang yang difasilitasi posko PPKM sesuai standart : Jumlah orang yang difasilitasi posko PPKM yang dilaksanakan ) x 100%	-	100%	350.868.000	
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM		-	1095	43.858.500	Kecamatan
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Bendogerit
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Gedog
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Sananwetan
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Karangtengah
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Plosokerep
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Rembang
			Jumlah Orang yang difasilitasi Posko PPKM			1095	43.858.500	Kelurahan Klampok
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	(Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti : Jumlah koordinasi pemerintahan umum) x 100%	NA	100%	420.699.150	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	(Jumlah koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ) x 100%	NA	100%	420.699.150	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	233.758.800	Kecamatan Sananwetan
	Jumlah TPS yang difasilitasi			0	0			
	Jumlah Peserta Lomba TPS			0	0			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu			0	0			

Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		1080 orang	1080 orang		
Jumlah peserta lelang bengkok		50 orang	50 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		1126 WP	1126 WP		
Jumlah patroli keamanan wilayah		48 patroli	48 patroli		
Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		3 lembaga	3 lembaga		
Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	20.319.400	Kelurahan Gedog
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		
Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu		0	0		
Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		30 orang	30 orang		
Jumlah peserta lelang bengkok		30 orang	30 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		3977 orang	3977 orang		
Jumlah patroli keamanan wilayah		12 patroli	12 patroli		
Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		0	0		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		0	0		

Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	28.944.000	Kelurahan Bendogerit
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		
Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu		0	0		
Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		30 orang	30 orang		
Jumlah peserta lelang bengkok		60 orang	60 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		3077 WP	3077 WP		
Jumlah patroli keamanan wilayah		48 patroli	48 patroli		
Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		1 lembaga	1 lembaga		
Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	53.290.800	Kelurahan Sananwetan
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		
Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu		0	0		
Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		200 orang	200 orang		
Jumlah peserta lelang bengkok		25 orang	25 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		4.144 WP	4.144 WP		
Jumlah patroli keamanan wilayah		24 patroli	24 patroli		

Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		1 lembaga	1 lembaga		
Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	21.007.100	Kelurahan Karangtengah
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		
Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu		0	0		
Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		30 orang	30 orang		
Jumlah peserta lelang bengkok		25 orang	25 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		2122 WP	2122 WP		
Jumlah patroli keamanan wilayah		48 patroli	48 patroli		
Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		1 lembaga	1 lembaga		
Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	27.216.400	Kelurahan Kalmpok
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		
Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu		0	0		
Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		30 orang	30 orang		

Jumlah peserta lelang bengkok		40 orang	40 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		2115 WP	2115 WP		
Jumlah patroli keamanan wilayah		48 patroli	48 patroli		
Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		1 lembaga	1 lembaga		
Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	19.157.950	Kelurahan Plosokerep
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		
Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu		0	0		
Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum		30 orang	30 orang		
Jumlah peserta lelang bengkok		32 orang	32 orang		
Jumlah wajib pajak membayar PBB		1916 WP	1916 WP		
Jumlah patroli keamanan wilayah		48 patroli	48 patroli		
Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi		1 lomba	1 lomba		
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi		1 lembaga	1 lembaga		
Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum		0	0	17.004.700	Kelurahan Rembang
Jumlah TPS yang difasilitasi		0	0		
Jumlah Peserta Lomba TPS		0	0		

		Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu	0	0		
		Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	35 orang	35 orang		
		Jumlah peserta lelang bengkok	30 orang	30 orang		
		Jumlah wajib pajak membayar PBB	1278 WP	1278 WP		
		Jumlah patroli keamanan wilayah	48 patroli	48 patroli		
		Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba	1 lomba		
		Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga		

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar  
Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026		K	Rp			
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Indeks	A (83,89)	A (86,88)	10.907.100.008	A (87,89)	11.406.956.513	A (88,89)	11.977.304.339	A (89,88)	12.576.169.556	A (89,88)	46.867.530.416	Kecamatan Sananwetan		
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	Indeks	A (83,89)	A (86,88)	10.907.100.008	A (87,89)	11.406.956.513	A (88,89)	11.977.304.339	A (89,88)	12.576.169.556	A (89,88)	46.867.530.416			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun berjalan	Indeks	Baik (81)	Baik (83)	10.907.100.008	Baik (84)	11.406.956.513	Baik (84)	11.977.304.339	Baik (84)	12.576.169.556	Baik (84)	46.867.530.416				

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	%	100	100	63.359.559	100	66.527.537	100	69.853.914	100	73.346.609	100	273.087.619		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	8	8	8.982.432	8	9.431.554	8	9.903.131	8	10.398.288	32	38.715.405		Kecamatan
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	1.203.370	5	1.263.539	5	1.326.715	5	1.393.051	20	5.186.675		Gedog
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	2.100.017	5	2.205.018	5	2.315.269	5	2.431.032	20	9.051.336		Plosokerep
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	2.550.133	5	2.677.640	5	2.811.522	5	2.952.098	20	10.991.392		Klampok
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	2.579.393	5	2.708.363	5	2.843.781	5	2.985.970	20	11.117.506		Sananwetan

	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	2.150.410	5	2.257.931	5	2.370.827	5	2.489.368	20	9.268.536		Rembang
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	1.836.500	5	1.928.325	5	2.024.741	5	2.125.978	20	7.915.545		Karangtengah
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	1.502.500	5	1.577.625	5	1.656.506	5	1.739.332	20	6.475.963		Bendogerit
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	6	6	40.454.804	6	42.477.544	6	44.601.421	6	46.831.492	24	174.365.262		Kecamatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu / Jumlah laporan keuangan yang tersusun) x 100%	%	100	100	9.239.661.983	100	9.701.645.082	100	10.186.727.336	100	10.696.063.703	100	39.824.098.104		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya pada tahun berjalan	Orang / bulan	75	80	9.230.259.305	80	9.691.772.270	80	10.176.360.884	80	10.685.178.928	80	39.783.571.387
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	401.666	5	421.749	5	442.837	5	464.979	20	1.731.231
	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	1.049.832	5	1.102.324	5	1.157.440	5	1.215.312	20	4.524.907

Kecamatan
Gedog
Plosokerep

Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	1.104.602	5	1.159.832	5	1.217.824	5	1.278.715	20	4.760.973
Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	1.561.616	5	1.639.697	5	1.721.682	5	1.807.766	20	6.730.760
Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	2.441.500	5	2.563.575	5	2.691.754	5	2.826.341	20	10.523.170

Klampok
Sananwetan
Rembang

	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	1.340.962	5	1.408.010	5	1.478.411	5	1.552.331	20	5.779.714		Karangtengah
	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5	5	1.502.500	5	1.577.625	5	1.656.506	5	1.739.332	20	6.475.963		Bendogerit
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart : Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) x 100%	%	100	100	360.920.837	100	378.966.879	100	397.915.223	100	417.810.984	100	1.555.613.923		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	1	21.363.800	1	22.431.990	1	23.553.590	1	24.731.269	4	92.080.648		Kecamatan

	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	1	5.600.000	1	5.880.000	1	6.174.000	1	6.482.700	4	24.136.700
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	1	5.200.000	1	5.460.000	1	5.733.000	1	6.019.650	4	22.412.650
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	1	6.000.000	1	6.300.000	1	6.615.000	1	6.945.750	4	25.860.750
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	1	6.800.000	1	7.140.000	1	7.497.000	1	7.871.850	4	29.308.850
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	0		1	5.880.000	1	6.174.000	1	6.482.700	3	18.536.700
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1	1	5.200.000	1	5.460.000	1	5.733.000	1	6.019.650	4	22.412.650
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Paket	1			1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	3	15.762.500
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	25	29	134.498.452	29	141.223.375	29	148.284.543	29	155.698.770	29	579.705.140
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang -	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang -	Orang	12	12	22.571.497	12	23.700.072	12	24.885.075	12	26.129.329	12	97.285.974

Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan
Gedog

undangan	undangan yang terfasilitasi													
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	12	12	20.482.190	12	21.506.300	12	22.581.614	12	23.710.695	12	88.280.799	
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	13	13	21.779.300	13	22.868.265	13	24.011.678	13	25.212.262	13	93.871.505	
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	11	11	24.057.304	11	25.260.169	11	26.523.178	11	27.849.337	11	103.689.987	
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	11	11	25.824.482	11	27.115.706	11	28.471.491	11	29.895.066	11	111.306.745	
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	13	13	20.014.600	13	21.015.330	13	22.066.097	13	23.169.401	13	86.265.428	
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang terfasilitasi	Orang	12	12	41.529.212	12	43.605.673	12	45.785.956	12	48.075.254	12	178.996.095	

Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart / Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah) x 100%	%	100	100	641.471.375	100	673.544.944	100	707.222.191	100	742.583.300	100	2.764.821.810		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	10.921.042	1	11.467.094	1	12.040.449	1	12.642.471	4	47.071.056		Kecamatan
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	2.476.250	1	2.600.063	1	2.730.066	1	2.866.569	4	10.672.947		Gedog
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	1.909.801	1	2.005.291	1	2.105.556	1	2.210.833	4	8.231.481		Plosokerep

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	5.937.026	1	6.233.877	1	6.545.571	1	6.872.850	4	25.589.324
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.533.464	1	4.760.137	1	4.998.144	1	5.248.051	4	19.539.797
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	3.508.956	1	3.684.404	1	3.868.624	1	4.062.055	4	15.124.039
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	3.660.612	1	3.843.643	1	4.035.825	1	4.237.616	4	15.777.695
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	3.246.092	1	3.408.397	1	3.578.816	1	3.757.757	4	13.991.062

Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	4	4	28.435.317	4	29.857.083	4	31.349.937	4	32.917.434	16	122.559.771
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	9.146.099	3	9.603.404	3	10.083.574	3	10.587.753	12	39.420.830
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	10.186.472	3	10.695.796	3	11.230.585	3	11.792.115	12	43.904.968
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	13.816.973	3	14.507.822	3	15.233.213	3	15.994.873	12	59.552.881
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	15.143.868	3	15.901.061	3	16.696.114	3	17.530.920	12	65.271.964
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	12.505.247	3	13.130.509	3	13.787.035	3	14.476.387	12	53.899.178
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	13.674.172	3	14.357.881	3	15.075.775	3	15.829.563	12	58.937.391
	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	12.505.247	3	13.130.509	3	13.787.035	3	14.476.387	12	53.899.178

Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klompok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah

	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	3	3	11.027.388	3	11.578.757	3	12.157.695	3	12.765.580	12	47.529.421
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	5	28.246.076	5	29.658.380	5	31.141.299	5	32.698.364	20	121.744.118
	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	6	6	10.055.791	6	10.558.581	6	11.086.510	6	11.640.835	24	43.341.716
	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	4	3.629.854	4	3.811.347	4	4.001.914	4	4.202.010	16	15.645.124
	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	5.929.188	3	6.225.647	3	6.536.930	3	6.863.776	12	25.555.541
	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	15.143.868	3	15.901.061	3	16.696.114	3	17.530.920	12	65.271.964
	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	4.259.736	3	4.472.723	3	4.696.359	3	4.931.177	12	18.359.995
	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlahpaket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	4.259.736	3	4.472.723	3	4.696.359	3	4.931.177	12	18.359.995

Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang

	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	6	6	19.758.233	6	20.746.145	6	21.783.452	6	22.872.624	24	85.160.454
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	5	8.918.574	5	9.364.503	5	9.832.728	5	10.324.364	20	38.440.169
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	20	22	71.323.000	22	74.889.150	22	78.633.608	22	82.565.288	88	307.411.045
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	2	14.007.000	2	14.707.350	2	15.442.718	2	16.214.853	8	60.371.921
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	7	7	16.388.000	7	17.207.400	7	18.067.770	7	18.971.159	28	70.634.329
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	12.508.000	1	13.133.400	1	13.790.070	1	14.479.574	4	53.911.044
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	28.090.000	1	29.494.500	1	30.969.225	1	32.517.686	4	121.071.411
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	28.090.000	1	29.494.500	1	30.969.225	1	32.517.686	4	121.071.411

Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klompok
Sananwetan

	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	7	7	13.804.000	7	14.494.200	7	15.218.910	7	15.979.856	28	59.496.966
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	9	9	15.371.500	9	16.140.075	9	16.947.079	9	17.794.433	36	66.253.086
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	25	25	5.005.000	25	5.255.250	25	5.518.013	25	5.793.913	100	21.572.176
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	21.669.254	1	22.752.717	1	23.890.353	1	25.084.870	4	93.397.193
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	2.921.976	1	3.068.075	1	3.221.479	1	3.382.552	4	12.594.082
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	6.246.316	1	6.558.632	1	6.886.563	1	7.230.892	4	26.922.403

Rembang
Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep

	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.630.443	1	4.861.965	1	5.105.063	1	5.360.317	4	19.957.788
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	12.409.260	1	13.029.723	1	13.681.209	1	14.365.270	4	53.485.462
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	8.425.127	1	8.846.383	1	9.288.703	1	9.753.138	4	36.313.351
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	13.507.197	1	14.182.557	1	14.891.685	1	15.636.269	4	58.217.707
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	7.265.703	1	7.628.988	1	8.010.438	1	8.410.959	4	31.316.088
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	60	60	11.880.000	60	12.474.000	60	13.097.700	60	13.752.585	240	51.204.285

Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	36	36	5.400.000	36	5.670.000	36	5.953.500	36	6.251.175	144	23.274.675
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	12	2.700.000	12	2.835.000	12	2.976.750	12	3.125.588	48	11.637.338
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	12	2.700.000	12	2.835.000	12	2.976.750	12	3.125.588	48	11.637.338
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	36	36	7.680.000	36	8.064.000	36	8.467.200	36	8.890.560	144	33.101.760
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	12	2.700.000	12	2.835.000	12	2.976.750	12	3.125.588	48	11.637.338

Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang

	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	12	3.900.000	12	4.095.000	12	4.299.750	12	4.514.738	48	16.809.488	Karangtengah
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	12	3.900.000	12	4.095.000	12	4.299.750	12	4.514.738	48	16.809.488	Bendogerit
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	20	20	100.969.500	20	106.017.975	20	111.318.874	20	116.884.817	80	435.191.166	Kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan / Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan) x 100%	%	100	100	6.704.613.149	100	7.039.843.806	100	7.391.835.997	100	7.761.427.797	100	28.897.720.749	
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	20	35	49.230.720	35	51.692.256	35	54.276.869	35	56.990.712	140	212.190.55	Kecamatan

	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit				20	16.000.000	20	16.800.000	20	17.640.000	60	50.440.000
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit		55	53.054.050	55	55.706.753	55	58.492.090	55	61.416.695	220	228.669.587
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit				4	8.000.000	4	8.400.000			8	16.400.000
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit		2	18.342.072	2	19.259.176	2	20.222.134	2	21.233.241	8	79.056.623
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit				2	10.000.000				-	2	10.000.000
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit				2	5.000.000	2	5.250.000			4	10.250.000
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Unit				0	-	2	5.000.000	2	5.250.000	4	10.250.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	3	33.216.637	3	34.877.469	3	36.621.342	3	38.452.409	12	143.167.858

Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	3	15.860.820	3	16.653.861	3	17.486.554	3	18.360.882	12	68.362.117
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	3	27.887.866	3	29.282.259	3	30.746.372	3	32.283.691	12	120.200.188
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	1	16.327.437	1	17.143.809	1	18.000.999	1	18.901.049	4	70.373.294
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	2	8.518.563	2	8.944.491	2	9.391.716	2	9.861.301	8	36.716.071
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	1	15.438.317	1	16.210.233	1	17.020.744	1	17.871.782	4	66.541.076
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	1	3.912.000	1	4.107.600	1	4.312.980	1	4.528.629	4	16.861.209

Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah

	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	1	20.812.571	1	21.853.200	1	22.945.860	1	24.093.153	4	89.704.783		Bendogerit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	unit	1	1	4.030.000.000	1	4.231.500.000	1	4.443.075.000	1	4.665.228.750	4	17.369.803.750		Kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart : jumlah penyediaan jasa penunjang usrusan) x 100%	%	100	100	1.206.006.048	100	1.266.306.350	100	1.329.621.668	100	1.396.102.751	100	5.198.036.818		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	24	52.199.625	24	54.809.606	24	57.550.087	24	60.427.591	96	224.986.909		Kecamatan
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	24	46.180.000	24	48.489.000	24	50.913.450	24	53.459.123	96	199.041.573		Gedog

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	36	20.418.400	36	21.439.320	36	22.511.286	36	23.636.850	144	88.005.856
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	24	28.689.556	24	30.124.034	24	31.630.235	24	33.211.747	96	123.655.573
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	36	17.042.116	36	17.894.222	36	18.788.933	36	19.728.380	144	73.453.650
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	36	24.877.816	36	26.121.707	36	27.427.792	36	28.799.182	144	107.226.497

Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang

	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	36	29.886.535	36	31.380.862	36	32.949.905	36	34.597.400	144	128.814.702
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	24	18.970.000	24	19.918.500	24	20.914.425	24	21.960.146	96	81.763.071
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	36	36	959.042.000	36	1.006.994.100	36	1.057.343.805	36	1.110.210.995	144	4.133.590.900
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	600.000	12	630.000	12	661.500	12	694.575	48	2.586.075
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.200.000	12	1.260.000	12	1.323.000	12	1.389.150	48	5.172.150

Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep

	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.200.000	12	1.260.000	12	1.323.000	12	1.389.150	48	5.172.150	Klampok
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.800.000	12	1.890.000	12	1.984.500	12	2.083.725	48	7.758.225	Sananwetan
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.200.000	12	1.260.000	12	1.323.000	12	1.389.150	48	5.172.150	Rembang
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.800.000	12	1.890.000	12	1.984.500	12	2.083.725	48	7.758.225	Karangtengah
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun berjalan	Laporan	12	12	900.000	12	945.000	12	992.250	12	1.041.863	48	3.879.113	Bendogerit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah barang milik daerah yang terpelihara sesuai standart / Jumlah barang milik daerah) x 100%	%	100	100	314.707.779	100	330.443.168	100	346.965.326	100	364.313.593	100	1.356.429.866	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	9	10	92.436.224	10	97.058.035	10	101.910.937	10	107.006.484	10	398.411.680
	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	6	6	6.435.600	6	6.757.380	6	7.095.249	6	7.450.011	6	27.738.240
	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	6	6	8.719.400	6	9.155.370	6	9.613.139	6	10.093.795	6	37.581.704
	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	6	6	7.881.100	6	8.275.155	6	8.688.913	6	9.123.358	6	33.968.526

Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klompok

Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	6	6	989.300	6	1.038.765	6	1.090.703	6	1.145.238	6	4.264.007
Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	6	6	11.037.100	6	11.588.955	6	12.168.403	6	12.776.823	6	47.571.281
Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	7	7	7.936.600	7	8.333.430	7	8.750.102	7	9.187.607	7	34.207.738
Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	6	6	15.893.400	6	16.688.070	6	17.522.474	6	18.398.597	6	68.502.541

Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit

Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara pada tahun berjalan	Unit	5	10	3.600.000	10	3.780.000	10	3.969.000	10	4.167.450	40	15.516.450
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	50	64	27.885.904	64	29.280.199	64	30.744.209	64	32.281.420	256	120.191.732
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10	18	7.143.700	18	7.500.885	18	7.875.929	18	8.269.726	72	30.790.240
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	36	38	15.958.000	38	16.755.900	38	17.593.695	38	18.473.380	152	68.780.975
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10			12	13.000.000	12	13.650.000			24	26.650.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10	16	15.041.000	16	15.793.050	16	16.582.703	16	17.411.838	64	64.828.590
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	32	32	15.271.700	32	16.035.285	32	16.837.049	32	17.678.902	128	65.822.936

Kecamatan
Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang

	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	30	54	15.419.000	54	16.189.950	54	16.999.448	54	17.849.420	216	66.457.817
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	40	40	18.590.800	40	19.520.340	40	20.496.357	40	21.521.175	160	80.128.672
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit		1	5.025.000	1	5.276.250	1	5.540.063	1	5.817.066	4	21.658.378
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit				0	-	0	-	1	4.000.000	1	4.000.000
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit		1	9.036.539	1	9.488.366	1	9.962.784	1	10.460.923	4	38.948.613
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit				0	-	2	4.000.000	2	4.200.000	4	8.200.000
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit				0	-	2	4.000.000	2	4.200.000	4	8.200.000

Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klampok

	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit				0	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit		1	15.245.212	1	16.007.473	1	16.807.846	1	17.648.239	4	65.708.769
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit		1	5.423.000	1	5.694.150	1	5.978.858	1	6.277.800	4	23.373.808
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit		1	1.750.000	1	1.837.500	1	1.929.375	1	2.025.844	4	7.542.719
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit		1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	4	21.550.625

Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit
Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit				0	'	0	'	0	'	0	'
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit				0	'	1	5.000.000	1	5.250.000	2	10.250.000
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit		6	2.989.200	6	3.138.660	6	3.295.593	6	3.460.373	24	12.883.826
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit				0	'	0	'	0	'	0	'
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit				0	'	0	'	0	'	0	'

Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan
Rembang

			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit				0	'	0	'	0	'	0	'		Karangtengah
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhab pada tahun berjalan	Unit				0	'	0	'	0	'	0	'		Bendogerit
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Indeks	Baik(81,37)	Baik (86)	21.303.035.451	Baik (87)	22.352.565.540	Baik (89)	Baik (90)	24.378.530.163	Baik (90)	91.290.478.013		Kecamatan Sananwetan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat			Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	%	97	97	2.665.773.328	97	2.783.440.311	98	98	2.828.267.957	98	10.986.246.964			
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu : (Jumlah pelayanan yang tepat waktu : Jumlah semua pelayanan) x 100%	%	NA	97	2.665.773.328	97	2.783.440.311	98	98	2.828.267.957	98	10.986.246.964			

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	(Jumlah koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan ) x 100%	%	100	100	828.020.334	100	869.421.351	100	912.892.418	100	958.537.039	100	3.568.871.142		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	4.448.240	1	4.670.652	1	4.904.185	1	5.149.394	4	19.172.470		Kecamatan
	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	1.161.756	1	1.219.844	1	1.280.836	1	1.344.878	4	5.007.314		Gedog
	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	1.243.105	1	1.305.260	1	1.370.523	1	1.439.049	4	5.357.938		Plosokerep

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	3.306.947	1	3.472.294	1	3.645.909	1	3.828.205	4	14.253.355
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	2.575.712	1	2.704.498	1	2.839.722	1	2.981.709	4	11.101.641
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	4.396.243	1	4.616.055	1	4.846.858	1	5.089.201	4	18.948.357
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	1.876.812	1	1.970.653	1	2.069.185	1	2.172.644	4	8.089.294

Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah

	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	1	1.104.908	1	1.160.153	1	1.218.161	1	1.279.069	4	4.762.292
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	NA	10	361.008.820	10	379.059.261	10	398.012.224	10	417.912.835	40	1.555.993.140
	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	1	1	98.664.873	1	103.598.117	1	108.778.022	1	114.216.924	4	425.257.936
	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	1	1	38.820.853	1	40.761.896	1	42.799.990	1	44.939.990	4	167.322.729

Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep

jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	40	40	41.473.941	40	43.547.638	40	45.725.020	40	48.011.271	160	178.757.870
jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	5	5	111.004.622	5	116.554.853	5	122.382.596	5	128.501.726	20	478.443.796
jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	1	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	4	129.303.750
jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang terpenuhi	Laporan	2	2	44.431.472	2	46.653.046	2	48.985.698	2	51.434.983	8	191.505.198

Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah



Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	(Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan ) x 100%	%	NA	100	16.060.573.390	100	16.863.602.060	100	17.706.782.162	100	18.592.121.271	100	69.223.078.883		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun berjalan	lembaga	7	7	66.179.480	7	69.488.454	7	72.962.877	7	76.611.021	28	285.241.831		Kecamatan
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pada tahun berjalan	lembaga	10	10	36.730.302	10	38.566.817	10	40.495.158	10	42.519.916	40	158.312.193		Gedog
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pada tahun berjalan	lembaga	45	45	22.940.919	45	24.087.965	45	25.292.363	45	26.556.981	180	98.878.229		Plosokerep

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pada tahun berjalan	lembaga	32	32	55.320.687	32	58.086.721	32	60.991.057	32	64.040.610	128	238.439.076
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pada tahun berjalan	lembaga	11	11	60.778.120	11	63.817.026	11	67.007.877	11	70.358.271	44	261.961.294
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pada tahun berjalan	lembaga	31	31	18.750.053	31	19.687.556	31	20.671.933	31	21.705.530	124	80.815.072
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pada tahun berjalan	lembaga	47	47	30.871.288	47	32.414.852	47	34.035.595	47	35.737.375	188	133.059.110

Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah

	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun berjalan	lembaga	11	11	52.747.036	11	55.384.388	11	58.153.607	11	61.061.288	44	227.346.319
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	7	7	675.750.449	7	709.537.971	7	745.014.870	7	782.265.614	28	2.912.568.904
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	15	15	2.933.734.500	15	3.080.421.225	15	3.234.442.286	15	3.396.164.401	60	12.644.762.412
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	47	47	1.328.232.473	47	1.394.644.097	47	1.464.376.301	47	1.537.595.117	188	5.724.847.988
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	8	8	1.498.707.859	8	1.573.643.252	8	1.652.325.415	8	1.734.941.685	32	6.459.618.211
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas											

Bendogerit
Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klampok

Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	19	19	3.537.102.492	19	3.713.957.617	19	3.899.655.497	19	4.094.638.272	76	15.245.353.878
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	31	31	936.466.000	31	983.289.300	31	1.032.453.765	31	1.084.076.453	124	4.036.285.518
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	11	11	2.151.153.850	11	2.258.711.543	11	2.371.647.120	11	2.490.229.476	44	9.271.741.988
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	Pokmas / Ormas	78	78	2.655.107.882	78	2.787.863.276	78	2.927.256.440	78	3.073.619.262	312	11.443.846.860

Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	(Jumlah koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ) x 100%	%	NA	100	1.085.343.981	100	1.139.611.180	100	1.196.591.739	100	1.256.421.326	100	4.677.968.226		
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	7	7	167.272.508	7	175.636.133	7	184.417.940	7	193.638.837	28	720.965.419		Kecamatan
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	6	6	35.481.749	6	37.255.836	6	39.118.628	6	41.074.560	24	152.930.773		Gedog
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	7	7	75.908.415	7	79.703.836	7	83.689.028	7	87.873.479	28	327.174.757		Plosokerep

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	4	4	78.347.586	4	82.264.965	4	86.378.214	4	90.697.124	16	337.687.889
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	7	7	192.610.040	7	202.240.542	7	212.352.569	7	222.970.198	28	830.173.349
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	8	8	85.797.100	8	90.086.955	8	94.591.303	8	99.320.868	32	369.796.226
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	10	10	62.067.523	10	65.170.899	10	68.429.444	10	71.850.916	40	267.518.783
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berjalan	Lembaga	8	8	126.733.483	8	133.070.157	8	139.723.665	8	146.709.848	32	546.237.153

Klampok
Sananwetan
Rembang
Karangtengah
Bendogerit

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	4	4	115.531.761	4	121.308.349	4	127.373.767	4	133.742.455	16	133.742.455
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	1	1	5.993.700	1	6.293.385	1	6.608.054	1	6.938.457	4	6.938.457
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	1	1	14.028.354	1	14.729.772	1	15.466.260	1	16.239.573	4	16.239.573
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	3	3	42.785.166	3	44.924.424	3	47.170.646	3	49.529.178	12	49.529.178
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	2	2	11.283.126	2	11.847.282	2	12.439.646	2	13.061.629	8	13.061.629

Kecamatan
Gedog
Plosokerep
Klampok
Sananwetan

	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	3	3	15.507.354	3	16.282.722	3	17.096.858	3	17.951.701	12	17.951.701	Rembang
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	3	3	29.687.695	3	31.172.080	3	32.730.684	3	34.367.218	12	34.367.218	Karangtengah
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	2	2	26.308.421	2	27.623.842	2	29.005.034	2	30.455.286	8	30.455.286	Bendogerit
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	(Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti : Jumlah koordinasi pemerintahan umum) x 100%	%	NA	100	441.734.108	100	463.820.813	100	487.011.854	100	486.664.088	100	1.879.230.863	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	(Jumlah koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart : Jumlah koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ) x 100%	%	NA	100	584.422.220	100	613.643.331	100	644.325.498	100	676.541.772	100	2.518.932.821		
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	---------------	--	--

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	1080	1080	260.751.596	## ##	273.789.176	1080	287.478.635	### #	301.852.566	4320	1.123.871.973	Kecamatan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	------	-------------	----------	-------------	------	-------------	----------	-------------	------	---------------	-----------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	600	600	43.962.673	60	0	46.160.807	60	0	48.468.847	600	50.892.289	240	0	189.484.616		Gedog
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-----	------------	----	---	------------	----	---	------------	-----	------------	-----	---	-------------	--	-------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	135	135	43.153.014	13	5	45.310.665	13	5	47.576.198	135	49.955.008	540	185.994.884	Plosokerep
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-----	------------	----	---	------------	----	---	------------	-----	------------	-----	-------------	------------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	32	32	32.891.493	32	34.536.068	32	36.262.871	32	38.076.015	128	141.766.446		Klampok
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----	-------------	--	---------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	239	239	85.403.532	23	9	89.673.709	23	9	94.157.394	239	98.865.264	956	368.099.898	Sananweta n
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-----	------------	----	---	------------	----	---	------------	-----	------------	-----	-------------	----------------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	85	85	40.757.263	85	42.795.126	85	44.934.882	85	47.181.627	340	175.668.898		Rembang
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----	-------------	--	---------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	145	145	37.515.449	14	5	39.391.221	14	5	41.360.783	145	43.428.822	580	161.696.275	Karangtengah
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-----	------------	----	---	------------	----	---	------------	-----	------------	-----	-------------	--------------

			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia pada tahun berjalan	Orang	554	554	39.987.200	55	4	41.986.560	55	4	44.085.888	554	46.290.182	221	6	172.349.830		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-----	------------	----	---	------------	----	---	------------	-----	------------	-----	---	-------------	--	--

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Sananwetan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Blitar, dalam mendukung misi Pemerintah Kota Blitar yang ke enam yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd

No	Indikator Kinerja	Formulasi / Definisi / Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik (81,37)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (87)	Baik (89)	Baik (90)	Baik (90)
2.	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	97%	97%	97%	97%	97%	98%	97%
3.	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang melaksanakan program kelurahan berdaya : Jumlah kelurahan )x 100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan  
2022 – 2026

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi / Definisi Operasional	Kondisi Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik (81,37)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (87)	Baik (89)	Baik (90)	Baik (90)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**


Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel di mana seluruh bagian dan seksi berkewajiban melaksanakan serta menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya organisasi yang ada.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar khususnya di Kecamatan Sananwetan sehingga mampu mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Kaidah Pelaksanaan :

1. Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan merupakan pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan.
2. Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Perubahan Rencana Strategis maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.

Blitar, Juni 2022  
CAMAT SANANWETAN



**PURWANTO, AP**  
Pembina Tk. I.  
NIP. 19730304 199311 1 002